



Konstitusi: Jurnal Studi Hukum

Yayasan Salmiah Education Global International
(YSEGI)

Jl. Pendidikan, Kec. Percut Sei Rotan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, 21333

Website: <https://glonus.org/index.php/kognisi> Email: glonus.info@gmail.com

Analisis Filosofis Terhadap Penyebab Menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Sumut 2024

Abdillah Rizki Tanjung¹, Aldi Firmansyah², Dela Amanda³, Nisa Syahrani⁴, Sundari⁵,
Wahdi Tamsir Siregar⁶, Windah Rsizkiyanti Harahap⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

¹abdillah0401221017@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab menurunnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatra Utara (Sumut) 2024 melalui pendekatan filosofis. Fenomena menurunnya partisipasi pemilih dalam pilkada seringkali disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat kompleks dan multidimensional. Dalam studi ini, dilakukan tinjauan pustaka terhadap teori-teori politik dan filsafat sosial yang relevan, seperti teori partisipasi politik, teori keadilan, dan filsafat politik demokrasi. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi masyarakat, di antaranya adalah ketidakpercayaan terhadap institusi politik, ketimpangan sosial-ekonomi, dan apatisme politik yang semakin meluas di kalangan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggali aspek etika politik dan peran nilai-nilai demokrasi dalam membentuk sikap partisipatif warga negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa penurunan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Sumut 2024 tidak hanya disebabkan oleh faktor struktural dan sosial-ekonomi, tetapi juga oleh faktor filosofis yang berkaitan dengan krisis legitimasi dan keterasingan politik. Dengan demikian, penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan memperkuat kesadaran demokrasi melalui pendidikan politik yang lebih inklusif dan dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik di tingkat daerah, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pilkada di masa depan.

Kata Kunci: Demokrasi, Filosofi Politik, Keadilan, Pilkada

Abstract

This study aims to analyze the causes of the decline in public participation in the 2024 North Sumatra (Sumut) Regional Head Election (Pilkada) through a philosophical approach. The phenomenon of declining voter participation in regional elections is often caused by various complex and multidimensional factors. In this study, a literature review was conducted on relevant political theories and social philosophies, such as the theory of political participation,

the theory of justice, and the philosophy of democratic politics. This study identifies several factors that contribute to low public participation, including distrust of political institutions, socio-economic inequality, and increasingly widespread political apathy among the community. In addition, this study also explores aspects of political ethics and the role of democratic values in shaping citizens' participatory attitudes. The results of the analysis show that the decline in public participation in the 2024 North Sumatra Pilkada was not only caused by structural and socio-economic factors, but also by philosophical factors related to the crisis of legitimacy and political alienation. Thus, it is important to restore public trust in the political system and strengthen democratic awareness through more inclusive political education and open dialogue between the government and the community. This research is expected to contribute to a deeper understanding of the factors that influence political participation at the regional level, as well as provide policy recommendations to increase community participation in the future regional election process.

Keywords: *Democracy, Justice, Political Philosophy, Regional Election*

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu proses demokrasi yang penting di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatra Utara (Sumut). Pilkada bukan hanya sekadar pemilihan pemimpin daerah, tetapi juga sarana untuk mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat dalam proses demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam Pilkada diharapkan dapat mencerminkan kualitas demokrasi yang berjalan, di mana setiap individu memiliki hak untuk memilih dan berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan daerah. Namun, belakangan ini, terdapat kecenderungan menurunnya partisipasi pemilih, khususnya dalam Pilkada Sumut 2024.

Berdasarkan data yang ada, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Sumut 2024 diperkirakan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidaktertarikan warga terhadap pemilihan, tetapi juga menunjukkan adanya permasalahan yang lebih mendalam dalam hubungan antara masyarakat dan sistem politik yang ada (Umi Kalsum, 2023). Berbagai faktor seperti apatisme politik, ketidakpercayaan terhadap kandidat maupun sistem politik, serta ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi di masyarakat diduga menjadi penyebab utama dari fenomena ini (Sutrisno, 2022).

Penting untuk memahami secara mendalam penyebab menurunnya partisipasi ini, salah satunya melalui pendekatan filosofis. Filosofi politik dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai masalah partisipasi politik, dengan mempertimbangkan nilai-nilai dasar dalam demokrasi seperti keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia (Siregar, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan analisis filosofis untuk menggali penyebab menurunnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Sumut 2024.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan demokrasi di Indonesia, khususnya di tingkat daerah (Rahmawati, 2023). Meskipun Pilkada dirancang untuk memberikan ruang bagi rakyat dalam menentukan pemimpin yang diinginkan, kenyataannya banyak daerah yang mengalami penurunan tingkat partisipasi masyarakat dari waktu ke waktu (Halim, 2020). Hal ini menjadi persoalan yang cukup serius, karena menurunnya partisipasi dapat berisiko terhadap kualitas demokrasi, legitimasi pemerintahan, dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Sudirman, 2021).

Di Provinsi Sumatra Utara, Pilkada 2024 menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi daerah. Namun, berbagai survei dan analisis menunjukkan bahwa partisipasi pemilih di Sumut diperkirakan akan mengalami penurunan (Budiman, 2020).

Beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap penurunan tersebut antara lain adalah ketidakpercayaan terhadap proses politik, ketimpangan ekonomi yang memperburuk kesenjangan sosial, serta ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan yang ada (Yuliana, 2022). Selain itu, adanya krisis legitimasi politik dan disorientasi masyarakat terhadap calon pemimpin yang berkualitas semakin memperburuk kondisi ini.

Pendekatan filosofis dalam memahami fenomena ini menjadi penting karena dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai makna partisipasi politik dan nilai-nilai yang mendasarinya (Dewi, 2024). Dalam tradisi filsafat politik, partisipasi dianggap sebagai bagian integral dari demokrasi yang tidak hanya melibatkan hak untuk memilih, tetapi juga melibatkan pemahaman tentang tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap kehidupan bersama (Prabowo, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Sumut 2024 dengan menggunakan perspektif filosofi politik, khususnya yang berkaitan dengan konsep keadilan, kebebasan, dan partisipasi politik yang sehat.

Meskipun banyak penelitian sebelumnya yang membahas fenomena menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan Pilkada di berbagai daerah, terdapat kekosongan penelitian yang mengkaji masalah ini dari perspektif filosofis, khususnya terkait dengan Pilkada Sumut 2024 (Hasibuan, 2023). Sebagian besar penelitian yang ada lebih fokus pada aspek sosial, politik, atau ekonomi yang berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi, tanpa menggali lebih dalam dimensi filosofis yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ada (Situmorang, 2020).

Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam Pilkada umumnya menyoroti faktor-faktor eksternal seperti ketidakpercayaan terhadap kandidat atau ketimpangan sosial-ekonomi, namun sedikit yang menelaah dari sudut pandang nilai-nilai dasar dalam filsafat politik seperti keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab sosial (Rahman, 2022). Selain itu, belum banyak kajian yang menelaah bagaimana krisis legitimasi dan etika politik dapat memengaruhi sikap apatisisme politik masyarakat, terutama dalam konteks Pilkada Sumut 2024 yang memiliki karakteristik sosial dan politik yang unik (Novita, 2020).

Penelitian ini menawarkan beberapa kebaruan (novelty) yang membedakannya dari studi-studi sebelumnya. Penelitian ini akan mengangkat perspektif filosofi politik untuk menganalisis penurunan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Sumut 2024. Berbeda dengan penelitian yang lebih bersifat deskriptif atau empirik, penelitian ini akan menggali dimensi etika, keadilan, dan legitimasi politik dalam konteks demokrasi lokal. Melalui penelitian ini, akan diungkap bagaimana masyarakat di Sumut memahami dan merespon konsep-konsep dasar demokrasi seperti keadilan sosial dan kebebasan, serta bagaimana pemahaman ini berhubungan dengan keputusan mereka untuk berpartisipasi atau tidak dalam Pilkada. Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara teori demokrasi dengan praktiknya di tingkat lokal.

Penelitian ini juga akan mengkaji fenomena krisis legitimasi yang terjadi dalam politik lokal Sumut, serta bagaimana hal ini berkontribusi terhadap menurunnya partisipasi pemilih. Ini adalah area yang relatif baru dalam studi tentang Pilkada, yang selama ini lebih banyak dibahas dalam konteks politik nasional. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya bersifat teknis atau praktis, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai filosofis yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pilkada dan meningkatkan partisipasi pemilih. Ini dapat menjadi kontribusi yang signifikan bagi perbaikan sistem demokrasi di daerah.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih holistik mengenai penyebab menurunnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada, serta menawarkan solusi yang dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, dan mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam Pilkada mendatang. Dengan demikian, penelitian

ini tidak hanya relevan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga bagi perumusan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Sumut.

Method

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau library research, yang bertujuan untuk mengkaji penyebab menurunnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Sumut 2024 melalui pendekatan filosofis. Metode studi pustaka dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman teoretis dari berbagai literatur yang relevan, baik dari kajian politik, filsafat, serta riset sebelumnya yang berkaitan dengan partisipasi politik (Creswell, 2020). Penelitian ini tidak mengandalkan data primer dari lapangan, melainkan menganalisis literatur yang ada untuk memahami fenomena yang diteliti.

Berikut adalah langkah-langkah dalam penerapan metode penelitian ini. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan topik. Sumber pustaka yang akan digunakan meliputi (Iskandar, 2022).

- Buku dan artikel akademik yang membahas tentang teori-teori partisipasi politik, filsafat politik, dan demokrasi.
- Jurnal ilmiah yang mengkaji fenomena menurunnya partisipasi politik dalam Pilkada, baik di Indonesia maupun di negara lain yang memiliki konteks serupa.
- Laporan survei dan data statistik mengenai partisipasi politik masyarakat di Sumut, khususnya dalam Pilkada 2024, untuk memberikan pemahaman tentang kondisi empiris.
- Teori-teori filsafat politik, seperti teori keadilan, teori demokrasi, teori partisipasi politik, dan konsep legitimasi politik, yang akan digunakan sebagai kerangka analisis.

Setelah mengumpulkan berbagai sumber pustaka, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kritis terhadap literatur yang ada. Dalam hal ini, analisis filosofis akan digunakan untuk menginterpretasi berbagai teori dan konsep yang relevan dengan isu partisipasi politik. Proses ini melibatkan (Rahmad Hidayat, 2022).

- Identifikasi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan partisipasi politik dalam konteks Pilkada, seperti keadilan, kebebasan, legitimasi, dan apatisisme politik.
- Penyusunan argumen filosofis terkait dengan nilai-nilai demokrasi dan bagaimana nilai-nilai ini berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam Pilkada.
- Perbandingan berbagai perspektif dalam teori-teori demokrasi dan partisipasi politik, serta analisis bagaimana faktor-faktor filosofis seperti krisis legitimasi atau ketidakpercayaan terhadap sistem politik dapat memengaruhi perilaku politik masyarakat.

Dalam penelitian ini, hasil analisis literatur akan disusun secara sistematis untuk membangun argumen yang koheren. Fokus utama adalah mengaitkan penyebab menurunnya partisipasi masyarakat dengan isu-isu filosofis, seperti (Sugiyono, 2022).

- Menurunnya kepercayaan terhadap sistem politik dan kandidat, serta bagaimana hal ini mempengaruhi keputusan masyarakat untuk berpartisipasi.
- Analisis bagaimana ketidakadilan sosial-ekonomi dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi.
- Bagaimana nilai-nilai demokrasi yang tidak terinternalisasi dengan baik dalam masyarakat dapat menyebabkan ketidakpedulian terhadap proses politik.

Langkah terakhir dalam metode ini adalah menyusun sintesis dari temuan-temuan yang diperoleh dari berbagai literatur yang telah dianalisis (Sugiyono, 2022). Penelitian ini akan menarik kesimpulan tentang penyebab filosofis menurunnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Sumut 2024, serta relevansi dari teori-teori politik dan filsafat yang digunakan dalam konteks lokal. Selain itu, akan dihasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki partisipasi politik dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil analisis filosofis, penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Sumut 2024.

Rekomendasi ini akan didasarkan pada (Creswell, 2020).

- Pendidikan politik berbasis nilai-nilai demokrasi, untuk memperkuat kesadaran politik masyarakat.
- Peningkatan legitimasi politik melalui transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses politik.
- Pemberdayaan masyarakat melalui dialog terbuka antara pemerintah dan warga untuk membangun kembali rasa memiliki terhadap sistem politik.

Kesimpulan Metode penelitian studi pustaka ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam penyebab filosofis menurunnya partisipasi politik dalam Pilkada Sumut 2024, serta memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai dasar dalam filsafat politik berperan penting dalam mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami dinamika partisipasi politik di Indonesia, khususnya dalam konteks Pilkada di daerah.

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab menurunnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Sumut 2024 melalui pendekatan filosofis. Berdasarkan hasil studi pustaka yang dilakukan, dapat ditemukan beberapa faktor filosofis yang berperan dalam fenomena ini. Pembahasan berikut menguraikan hasil temuan yang berkaitan dengan teori-teori filosofis yang relevan, serta implikasi dari faktor-faktor tersebut terhadap partisipasi masyarakat dalam Pilkada Sumut.

Krisis Legitimasi Politik dan Ketidakpercayaan terhadap Proses Demokrasi

Salah satu penyebab utama menurunnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Sumut 2024 adalah krisis legitimasi politik yang melibatkan ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan institusi yang ada. Teori legitimasi politik yang dikemukakan oleh Max Weber dan John Rawls menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi, kepercayaan terhadap pemerintah dan proses politik sangat bergantung pada persepsi masyarakat terhadap keadilan dan moralitas sistem tersebut. Dalam konteks Pilkada Sumut, banyak warga yang merasa bahwa pemilihan umum tidak memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kehidupan mereka, serta adanya praktik politik uang, korupsi, dan ketidakadilan dalam proses politik yang membuat mereka skeptis terhadap hasil pemilihan.

Fenomena ini dapat dianalisis melalui lensa teori keadilan Rawls, yang menekankan pentingnya keadilan distributif dalam struktur sosial. Apabila masyarakat merasa bahwa hak-hak mereka tidak dihargai atau tidak merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah, mereka cenderung menjadi apatis terhadap partisipasi politik. Ketidakadilan yang dirasakan mengarah pada pengabaian terhadap proses pemilihan, yang mereka anggap tidak membawa perubahan signifikan. Ini menjelaskan mengapa tingkat partisipasi dalam Pilkada Sumut cenderung menurun, karena masyarakat merasa tidak memiliki kedudukan yang setara dalam sistem politik.

Apatisme Politik dan Alienasi Sosial

Fenomena apatisme politik di Sumut dapat dijelaskan melalui perspektif teori alienasi dari Karl Marx. Menurut Marx, alienasi terjadi ketika individu merasa terpisah atau terasing dari proses sosial dan politik yang seharusnya mereka kontrol. Dalam konteks Pilkada Sumut, masyarakat merasa bahwa keputusan politik seringkali tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil atau marginal, politik dianggap sebagai arena yang jauh dari kehidupan mereka sehari-hari.

Filsuf politik seperti Alexis de Tocqueville juga mengemukakan pentingnya partisipasi sebagai bagian dari ikatan sosial dalam demokrasi. Namun, jika individu merasa bahwa suara

mereka tidak dihargai atau tidak mempengaruhi hasil pemilihan, mereka cenderung tidak tertarik untuk berpartisipasi. Ketidakpedulian ini merupakan bentuk alienasi sosial yang mengarah pada penurunan partisipasi politik. Dalam Pilkada Sumut 2024, hal ini tercermin dalam rendahnya kesadaran politik masyarakat, terutama di kalangan pemilih muda dan warga yang terpinggirkan.

Ketimpangan Sosial-Ekonomi dan Partisipasi Politik

Ketimpangan sosial-ekonomi juga memainkan peran penting dalam menurunnya partisipasi politik. Teori-teori politik yang mengacu pada ketimpangan sosial, seperti teori konflik yang diajukan oleh Karl Marx, mengungkapkan bahwa ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan akan menyebabkan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik. Di Sumut, masih terdapat kesenjangan sosial-ekonomi yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat kaya dan miskin.

Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan atau ketidakpastian ekonomi lebih cenderung untuk mengabaikan Pilkada, karena mereka merasa bahwa proses politik tidak akan membawa perbaikan bagi kondisi mereka. Ketika rakyat merasa terpinggirkan secara sosial dan ekonomi, mereka cenderung mengalihkan perhatian mereka dari kegiatan politik menuju masalah kehidupan sehari-hari yang lebih mendesak. Hal ini berkontribusi pada penurunan partisipasi dalam Pilkada, karena ketidakmampuan mereka untuk melihat relevansi politik dengan kehidupan mereka.

Persepsi terhadap Kandidat dan Pengaruh Media

Selain faktor-faktor filosofis yang telah disebutkan, persepsi masyarakat terhadap kandidat dan proses pemilihan juga mempengaruhi partisipasi. Menurut teori politik komunikasi, media memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap pemilu dan kandidat. Dalam kasus Pilkada Sumut 2024, banyaknya berita negatif tentang calon kepala daerah, serta pemberitaan yang mengedepankan kontroversi atau skandal, berpotensi memperburuk citra politik dan memperkuat sikap apatis dari masyarakat.

Pergeseran fokus dari isu-isu substansial ke kontroversi atau negativitas media dapat mengurangi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi. Hal ini menurunkan rasa pentingnya bagi masyarakat untuk memilih, karena mereka merasa tidak ada calon yang benar-benar mampu membawa perubahan. Teori politik komunikasi ini menunjukkan bagaimana media dapat membentuk persepsi dan sikap masyarakat, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam pemilihan.

Pentingnya Pendidikan Politik untuk Mengatasi Krisis Partisipasi

Sebagai solusi terhadap penurunan partisipasi, penting untuk menciptakan program pendidikan politik yang lebih inklusif dan berbasis nilai-nilai demokrasi yang kuat. Teori pendidikan politik, sebagaimana yang diungkapkan oleh John Dewey, mengemukakan bahwa pendidikan politik yang baik harus dapat memberdayakan individu untuk memahami peran mereka dalam demokrasi dan pentingnya partisipasi aktif dalam politik. Pendidikan politik yang menekankan pada penguatan nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab sosial dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mengurangi rasa apatis.

Dengan meningkatkan pemahaman tentang hak-hak politik dan dampak dari partisipasi, masyarakat diharapkan dapat lebih termotivasi untuk ikut serta dalam Pilkada, serta memperbaiki hubungan mereka dengan sistem politik. Program pendidikan politik yang menyasar kelompok-kelompok marginal dan pemilih muda akan sangat penting untuk menciptakan budaya politik yang lebih partisipatif di masa depan. Untuk menggali lebih dalam mengenai penyebab menurunnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Sumut 2024, beberapa jurnal yang relevan dengan tema ini memberikan perspektif yang beragam. Pembahasan

berikut akan merangkum hasil analisis dari jurnal-jurnal yang mengkaji faktor-faktor filosofis yang mempengaruhi partisipasi politik, serta bagaimana faktor-faktor ini dapat diterapkan dalam konteks Pilkada Sumut 2024.

Jurnal (Putra, 2024) mengemukakan bahwa krisis legitimasi politik adalah faktor utama yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada. (Budiman, 2020) mengenai tipe-tipe legitimasi dalam pemerintahan, yang meliputi legitimasi tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Dalam konteks Pilkada Sumut 2024, masyarakat cenderung merasa tidak percaya terhadap calon kepala daerah yang mereka anggap tidak mampu menghadirkan perubahan signifikan, atau terlibat dalam praktik politik yang tidak transparan. Pemerintah dan calon kepala daerah yang tidak mampu menciptakan kepercayaan atau yang terjerat kasus-kasus korupsi berpotensi membuat masyarakat merasa teralienasi dan enggan untuk berpartisipasi. Sebagai contoh, dalam Pilkada Sumut 2020, berbagai skandal politik dan ekonomi yang melibatkan elite politik membuat sebagian masyarakat merasa sistem politik lokal tidak adil dan tidak berpihak kepada rakyat.

Menurut jurnal (Arifin, 2021) salah satu penyebab menurunnya partisipasi adalah alienasi sosial, yang mengarah pada apatisme politik. (Halim, 2020) mengenai alienasi, di mana individu merasa terpisah dari proses politik yang seharusnya mereka kendalikan. Dalam konteks Pilkada, masyarakat yang merasa terpinggirkan baik secara sosial maupun ekonomi cenderung tidak merasa terhubung dengan calon kepala daerah yang mereka pilih. Di Sumut, ketimpangan sosial-ekonomi dan perbedaan antara kota dan desa juga memperburuk apatisme politik. Masyarakat yang hidup di daerah terpencil merasa bahwa suara mereka tidak dihargai, dan oleh karena itu, mereka cenderung mengabaikan Pilkada. Hal ini diperburuk oleh kurangnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat di daerah-daerah tersebut.

Jurnal (Kurniawan, 2020) membahas bagaimana ketimpangan sosial-ekonomi dapat memengaruhi partisipasi politik. (Yuliana, 2022) mengacu pada teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx, yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial seringkali menyebabkan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik. Masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi cenderung merasa bahwa proses politik tidak memberikan keuntungan nyata bagi mereka. Dalam Pilkada Sumut 2024, ketimpangan sosial-ekonomi yang signifikan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan, menjadi faktor penghalang bagi banyak orang untuk berpartisipasi. Mereka yang berada di kalangan masyarakat miskin atau marginal sering kali merasa bahwa Pilkada tidak akan membawa perubahan signifikan dalam kualitas hidup mereka, sehingga mereka cenderung tidak tertarik untuk memilih.

Dalam jurnal (Utama, 2022), dijelaskan bahwa persepsi negatif terhadap kandidat juga merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi partisipasi politik. (Kurniawan, 2020) mengemukakan bahwa media memainkan peran penting dalam membentuk opini publik mengenai kandidat dan proses pemilihan. Di Sumut, pemberitaan negatif yang berfokus pada skandal atau kekurangan calon kepala daerah seringkali membuat masyarakat merasa tidak ada pilihan yang layak. Pergeseran fokus media dari isu-isu substantif ke isu-isu kontroversial atau sensasional dapat memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap Pilkada. Hal ini semakin memperkuat apatisme politik, di mana masyarakat merasa bahwa pilihan mereka tidak akan berdampak signifikan terhadap perbaikan kehidupan mereka.

Salah satu solusi yang sering disarankan dalam jurnal (Putri Syahri, 2024) adalah pentingnya pendidikan politik untuk membangun kesadaran politik masyarakat. (Putra, 2024) mengemukakan bahwa pendidikan politik yang berbasis pada pemahaman tentang hak-hak demokrasi dan peran aktif masyarakat dalam politik dapat meningkatkan tingkat partisipasi. Pendidikan politik harus mampu mengubah sikap apatisme menjadi kesadaran kolektif bahwa setiap suara memiliki dampak terhadap masa depan daerah. Dari pembahasan di atas, dapat

disimpulkan bahwa penurunan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Sumut 2024 disebabkan oleh berbagai faktor filosofis yang saling berkaitan. Krisis legitimasi politik, apatisme akibat alienasi sosial, ketimpangan sosial-ekonomi, serta pengaruh media terhadap persepsi publik terhadap kandidat, semuanya berperan dalam menurunkan partisipasi politik. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan melalui pendidikan politik yang inklusif dan berbasis nilai-nilai demokrasi menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan partisipasi masyarakat di masa depan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian studi pustaka mengenai *Analisis Filosofis Terhadap Penyebab Menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Sumut 2024*, dapat disimpulkan bahwa penurunan partisipasi masyarakat dalam Pilkada ini dipengaruhi oleh beberapa faktor filosofis yang saling berkaitan. Masyarakat yang merasa bahwa proses pemilihan tidak membawa perubahan nyata atau bahwa pemerintahan tidak mewakili aspirasi mereka, mengalami krisis legitimasi. Masyarakat yang tidak merasa memiliki pengaruh atau hubungan dengan sistem politik cenderung enggan untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Ketimpangan sosial-ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antar kelas sosial, memperburuk kondisi ini. Masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit cenderung merasa bahwa proses politik tidak relevan dengan perbaikan kondisi hidup mereka, sehingga mereka enggan untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Ketika masyarakat merasa bahwa tidak ada kandidat yang memenuhi harapan mereka, atau ketika mereka meragukan integritas kandidat, mereka menjadi lebih apatis terhadap proses pemilihan. Pendidikan politik yang mendorong kesadaran politik dan pemahaman tentang hak-hak serta tanggung jawab warga negara dalam demokrasi dapat membantu membangun kembali keterlibatan aktif masyarakat dalam Pilkada. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor filosofis, seperti krisis legitimasi, apatisme, ketimpangan sosial, dan persepsi terhadap kandidat, memainkan peran penting dalam menurunnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Sumut 2024. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi politik, diperlukan pendekatan yang holistik, termasuk pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan politik dan upaya untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam sistem politik.

Daftar Pustaka

- Arifin. (2021). Mengatasi Ketidakpercayaan dalam Demokrasi: Keterlibatan Masyarakat dalam Pilkada. *Jurnal Demokrasi dan Politik*, 9(4), 200-215.
- Budiman. (2020). Krisis Legitimasi Politik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Analisis Politik*, 9(1), 95-110.
- Creswell, J. (2020). *Desain Penelitian: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (edisi ke-4)*. Thousand Oaks: CA: Publikasi Sage.
- Dewi. (2024). Keterlibatan Masyarakat dalam Pilkada: Analisis Faktor Sosial dan Ekonomi. *Jurnal Politik Indonesia*, 12(2), 240-254.
- Halim. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Kandidat dalam Pilkada. *Jurnal Komunikasi Politik*, 18(3), 200-214.
- Hasibuan. (2023). Partisipasi Politik dan Keadilan Sosial: Perspektif Teori Marx dalam Pilkada. *Jurnal Politik dan Filsafat*, 6(4), 175-190.
- Iskandar, T. (2022). PENDIDIKAN TAUHID TERHADAP MOTIVASI HIDUP DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN. *Reflektika*, 17(2), 397-412. doi:10.28944/reflektika.v17i2.986
- Kurniawan. (2020). Media dan Partisipasi Politik dalam Pilkada: Studi Peran Media dalam Membentuk Opini Publik. *Jurnal Komunikasi Politik*, 19(1), 30-45.
- Novita. (2020). Apatisme Politik dalam Konteks Pilkada: Perspektif Filsafat Politik. *Jurnal*

- Teori Politik*, 2, 90-105.
- Prabowo. (2021). Legitimasi Pemilu dan Partisipasi Politik di Indonesia. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 17(3), 120-135.
- Putra. (2024). Krisis Legitimasi dan Partisipasi Politik dalam Pilkada di Sumut. *Jurnal Sosial dan Politik*, 14(3), 180-195.
- Putri Syahri, S. S. (2024). Implementasi modernisasi agama di Kampus UIN Raden Fatah Palembang dengan tujuan bisa saling menghargai antar budaya dan agama. *Academy of Education Journal*, 15(1), 278-287. doi:<https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2171>
- Rahmad Hidayat, T. I. (2022). Strategi Meningkatkan Penghasilan untuk Kesejahteraan Keluarga Pedagang. *Inovatif: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital dan Kewirausahaan*, 1(4), 305-315. doi:<https://doi.org/10.55983/inov.v1i4.197>
- Rahman. (2022). Dinamika Partisipasi Politik di Daerah: Studi Kasus Pilkada Sumatera Utara. *Jurnal Politik Lokal*, 5(2), 110-125.
- Rahmawati. (2023). Ketimpangan Sosial dan Partisipasi Politik dalam Pilkada. *Jurnal Sosial Politik*, 13(4), 312-325.
- Siregar. (2024). Apatisme Politik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada. *Jurnal Demokrasi dan Partisipasi*, 15(1), 45-60.
- Situmorang. (2020). Ketimpangan Sosial-Ekonomi dan Partisipasi Politik dalam Pilkada. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 16(1), 23-38.
- Sudirman. (2021). Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Politik*, 11(2), 155-170.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutrisno. (2022). Legitimasi Politik dalam Demokrasi: Studi Kasus Pilkada. *Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), 123-139.
- Umi Kalsum, P. S. (2023). *ISU-ISU KONTEMPORER*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Utama. (2022). Partisipasi Politik Masyarakat Muda dalam Pilkada: Analisis Berdasarkan Teori Sosial Politik. *Jurnal Pemilih Muda*, 8(1), 56-70.
- Yuliana. (2022). Partisipasi Politik dalam Era Demokrasi: Studi Kasus Pilkada 2020 di Sumut. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 14(1), 75-89.